

DEMOKRASI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI

**Rahma Amalia¹, Febri Alwina², Juliya Ravalina³, Asmaul Husna⁴, Nadila Nur Sapitha⁵,
Hamdi Abdullah Hasibuan⁶**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Riau

Email : rahma.amalia5136@student.unri.ac.id¹, febri.alwina4117@student.unri.ac.id²,
juliya.ravalina3835@student.unri.ac.id³, asmaul.husna5784@student.unri.ac.id⁴,
nadila.nur5132@student.unri.ac.id⁵, hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id⁶

Abstrak: Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi, demokrasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk arus globalisasi yang memengaruhi politik, sosial, dan budaya. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan, baik dalam aspek positif seperti kemajuan teknologi dan akses informasi, maupun dampak negatif seperti krisis moral, individualisme, dan masuknya budaya asing yang mengancam identitas nasional. Dalam menghadapi tantangan ini, nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan, menjadi semakin relevan untuk menjaga keutuhan bangsa. Artikel ini membahas bagaimana Demokrasi Pancasila dapat bertahan di era globalisasi, dengan menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola negara. Penguatan lembaga demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan sistem demokrasi ini di tengah tantangan global.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, globalisasi, kedaulatan rakyat

Abstract: Pancasila Democracy is a unique democratic system in Indonesia, grounded in the values of Pancasila. In the era of globalization, this form of democracy faces numerous challenges, including the influence of globalization on politics, society, and culture. Globalization has brought significant changes, both positive, such as technological advancements and information accessibility, and negative impacts, like moral crises, individualism, and the infiltration of foreign cultures that threaten national identity. In addressing these challenges, the values of Pancasila, such as deliberation, social justice, and unity, become increasingly relevant for preserving the nation's integrity. This article discusses how Pancasila Democracy can endure in the globalization era by emphasizing the importance of applying these values in everyday life and governance. Strengthening democratic institutions and promoting active public participation are also essential for sustaining this system

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

amid global challenges.

Keywords: *Pancasila Democracy, globalization, national sovereignty*

PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang didasarkan pada Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Sistem ini menggabungkan nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan nilai-nilai lokal dari lima sila Pancasila. Nilai-nilai ini mencakup kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berbeda dari demokrasi lainnya karena menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, bukan hanya suara mayoritas.

Di era globalisasi saat ini, Demokrasi Pancasila menghadapi tantangan baru. Globalisasi, yang ditandai dengan semakin terhubungnya negara-negara di seluruh dunia melalui teknologi, perdagangan, dan budaya, membawa perubahan besar bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Globalisasi mempercepat arus informasi, membuka akses ke teknologi dan pengetahuan baru, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa ancaman seperti masuknya pengaruh budaya asing yang bisa merusak nilai-nilai lokal, menurunnya rasa kebersamaan, serta meningkatnya individualisme dan materialisme.

Tantangan terbesar bagi Demokrasi Pancasila di era globalisasi adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan global dan identitas nasional. Globalisasi membawa dampak positif, seperti inovasi teknologi dan keterhubungan antarnegara, tetapi juga bisa menyebabkan krisis identitas jika nilai-nilai nasional, seperti gotong royong dan persatuan, mulai terabaikan. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga membawa risiko lain, seperti penyebaran berita palsu, polarisasi politik, dan munculnya konflik sosial.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Demokrasi Pancasila perlu diperkuat. Nilai-nilai Pancasila harus terus diterapkan dalam kehidupan politik dan pemerintahan agar Indonesia tetap bisa menghadapi globalisasi tanpa kehilangan identitasnya. Sistem musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila harus terus dijaga agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, penguatan lembaga negara dan pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila juga penting untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan global.

Artikel ini bertujuan untuk membahas tantangan yang dihadapi Demokrasi Pancasila di era globalisasi dan mencari cara untuk memperkuat sistem demokrasi ini agar tetap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia (Alfalah, 2023).

LANDASAN TEORI

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan politik. Di era globalisasi, demokrasi menghadapi tantangan dan peluang baru yang dipengaruhi oleh dinamika global, seperti perkembangan teknologi informasi, meningkatnya interkoneksi antarnegara, dan arus budaya yang melintas batas geografis. Globalisasi, yang ditandai dengan integrasi ekonomi, sosial, dan politik antarnegara, membuka peluang untuk memperkuat demokrasi melalui

penyebaran nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia, dan transparansi. Namun, globalisasi juga membawa ancaman seperti pengaruh kekuatan korporasi global terhadap kebijakan domestik, meningkatnya ketimpangan, dan munculnya populisme yang dapat melemahkan prinsip demokrasi. Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan antara demokrasi dan globalisasi menjadi penting untuk mengidentifikasi cara-cara agar demokrasi dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan global yang cepat (Held, 1995).

METODE PENELITIAN

Artikel ini memakai metode penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui teknik studi literatur. Artikel ini mengkaji literatur dan dokumen-dokumen terkait yang membahas konsep Demokrasi Pancasila serta tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam sistem politik Indonesia dan bagaimana tantangan globalisasi memengaruhi praktik-praktik demokrasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan identitas nasional di tengah pengaruh globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang menganut nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan memandang kehidupan bangsa Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilandaskan pada nilai yang terdapat pada Pancasila. Selain itu, demokrasi Pancasila memiliki prinsip dan karakteristik utama demokrasi. Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi di Indonesia tertuang dalam ayat 4 Pancasila, yang berperan penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam perjalanan implementasinya, demokrasi Pancasila Indonesia mengalami pasang surut, namun kini telah mengalami perubahan dan mulai berkembang dengan baik. Demokrasi di Pancasila juga sangat penting karena membawa kehidupan yang baik bagi negara. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga dan mengimplementasikan kehadiran Pancasila sebagai upaya membangkitkan kesadaran nasional di era globalisasi.

Demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat, baik itu administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Dalam demokrasi rakyat, rakyat memainkan peran penting dalam menentukan politik nasional. Nilai-nilai demokrasi rakyat meliputi kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan memilih, keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan rakyat dan didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila diperlukan agar dapat menjalani kehidupan yang baik di tanah air. Demokrasi Pancasila masih dalam tahap perkembangannya, dan meskipun terdapat perbedaan tafsir dan pendapat tentang karakteristik dan karakteristiknya, beberapa nilai dasar demokrasi konstitusional jelas terkandung dalam UUD 1945 (Rohim dan Miftahul 2023).

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Walaupun dasar konstitusional demokrasi di Indonesia sudah ada sebelum tahun 1965, istilah "Demokrasi Pancasila" baru menjadi populer setelah Orde Baru muncul pada tahun 1966 sebagai respon terhadap Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Demokrasi Terpimpin tersebut dilembagakan secara hukum melalui Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, yang menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai pedoman lembaga perwakilan.

Ketika Orde Baru muncul, konsep Demokrasi Terpimpin ini ditolak, dan pada tahun 1968 MPRS mencabut Ketetapan tersebut melalui Tap No. XXXVII/MPRS/1968. Tap ini mengatur panduan baru bagi pelaksanaan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Demokrasi Pancasila, prinsip musyawarah untuk mufakat tetap diutamakan. Namun, jika tidak tercapai mufakat bulat, keputusan dapat diambil melalui voting atau pemungutan suara, sesuai prosedur dalam Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945. Perumusan Demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, kembali dicabut dengan Tap No. V/MPR/1973. Tetapi lebih dari sekedar soal teknis prosedural, sudah banyak dilakukan upaya untuk memberikan pengertian mengenai Demokrasi Pancasila. Dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto mendefinisikan Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi kedaulatan rakyat dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Kedaulatan rakyat diresapi dan disatukan ke dalam sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa menjalankan hak-hak demokrasi harus selalu dilakukan dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada kenyataannya, rezim Orde Baru adalah rezim yang represif. Pemerintahan yang tirani. Dalam sistem politik Orde Baru, jajaran militer yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum langsung mendapat jatah 100 kursi (sekitar 20%) di DPR/MPR. Selain itu, mereka juga menduduki beberapa jabatan penting dalam kabinet, birokrasi, dan urusan ekonomi. Rezim Orde Baru, yang sebagian besar mengandalkan militer, berusaha membatasi ruang gerak partai politik dan organisasi pro-demokrasi. DPR/MPR terkadang dipandang sebagai lembaga stempel karena pengaruh presiden yang besar. Selain dukungan Presiden dari wakil ABRI dan anggota parlemen dari Golkar, wakil pada parpol hanya mereka yang di anggap loyal pada rezim orde baru yang dapat lolos sebagai bagian dari anggota legislatif. Campur tangan otoritas untuk menjaga kesetiaan partai juga mempengaruhi struktur administrasi partai. Aktivis partai yang tidak memiliki hubungan dengan militer, birokrasi, atau 'keluarga cendana' biasanya akan menghadapi kesulitan atau tidak diberi kesempatan untuk menjadi pengurus partai (Sudrajat, 2016).

Demokrasi Pancasila di Era Globalisasi

Globalisasi adalah fenomena yang menyebabkan sosio-kultural antar negara menjadi saling terhubung sehingga budaya di berbagai dunia seolah-olah bergabung menjadi budaya global. Sebagai dampaknya, hubungan antar negara semakin erat. Arus globalisasi tidak dapat dihentikan. Perkembangan globalisasi penyebab utamanya karna kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penyebab utamanya.

Proses globalisasi berkembang semakin cepat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak globalisasi tidak hanya terlihat pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada

perubahan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain. Dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat, Indonesia sebagai negara harus memperkuat identitas dan pertahanannya, terutama untuk menghindari dampak negatif yang bisa memengaruhi fondasi bangsa.

Peran Pancasila sangat krusial di Era Globalisasi. Sebagai ideologi dasar yang mengandung etika dan nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan hidup dan fondasi yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Tantangan Pancasila dalam menghadapi Era Globalisasi dan cara menghadapinya didasarkan pada pengaruh globalisasi yang nyata, yang tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga seluruh aspek kehidupan dan masyarakat. Arus globalisasi yang kuat turut mempengaruhi negara berkembang, termasuk Indonesia. Era Globalisasi berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang ada. Hal ini menjadi bukti nyata dampak negatif globalisasi, terutama dalam mengikis identitas suatu bangsa, yang menjadi tantangan besar bagi ideologi Pancasila.

Beberapa penyimpangan terhadap sila-sila Pancasila antara lain: pada sila pertama, pelanggaran terhadap aturan agama dan hilangnya toleransi dalam masyarakat. Pada sila kedua, penyimpangan dapat terlihat dari tingginya pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti pembunuhan, perampokan, dan eksploitasi. Pada sila ketiga, penyimpangan terlihat dalam kurangnya rasa persatuan dan berkembangnya sikap individualisme. Pada sila keempat, banyak terjadi penyimpangan dalam pemerintahan yang berdampak buruk pada rakyat, seperti meningkatnya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada sila kelima, meskipun mengusung keadilan, pelaksanaannya seringkali diwarnai oleh kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dampak negatif globalisasi yang dapat menjadi ancaman dan tantangan bagi bangsa Indonesia memerlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga pertahanan negara. Dalam hal ini, Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar yang kokoh dan sebagai pedoman etika dalam perilaku. Oleh karena itu, pola pikir, sikap, dan aktivitas masyarakat harus selalu berlandaskan pada Pancasila dan nilai-nilainya.

Nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 menempatkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia. Dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, Pancasila menjadi bagian penting dari sistem pertahanan nasional. Pancasila berfungsi sebagai landasan pertahanan negara yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendukung pencapaian tujuan nasional, seperti melindungi rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan bangsa, dan turut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial (Wardhani, 2022).

Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi kepada peserta didik, semangat nasionalisme dapat dibangkitkan. Nasionalisme ini bisa dipupuk melalui peringatan hari-hari penting seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Guru dan dosen yang mengajar dengan ketulusan dapat membimbing siswa hingga mencapai prestasi yang membanggakan. Pelajar yang berusaha keras dengan sepenuh hati, mengerahkan kemampuan terbaik mereka demi kehormatan bangsa dan negara, serta mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan ekonomi negara. Selain itu, nasionalisme dapat diwujudkan melalui karya seni, seperti menciptakan lagu bertema cinta tanah air, melukis, seni pertunjukan yang

mengangkat semangat perjuangan, serta bentuk seni lainnya.

Menanamkan semangat nasionalisme yang tinggi, seperti rasa bangga terhadap produk lokal, juga mencakup penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara optimal, praktik ajaran agama dengan baik, serta mewujudkan supremasi hukum dengan penegakan supremasi hukum. Selain itu, selektif dalam menyaring pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya juga sangat penting (Asmaroni, 2016).

Tantangan Demokrasi Pancasila di Era Globalisasi

Pada era yang semakin digital menyebabkan penggunaan teknologi informasi sebagai kekuatan utama dalam komunikasi, berinteraksi serta bekerja. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang sangat banyak, tetapi disertai juga dengan dampak negatif yang harus dihadapi. Kemajuan pada era digital tidak selalu memberikan hal positif kepada masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap generasi milenial yang mulai mengalami perubahan yaitu mudurnya nilai-nilai Pancasila akibat globalisasi. Banyak kasus yang diberitakan secara luas di media seperti, KKN (korupsi, konspirasi, dan nepotisme), pornografi, narkoba pelanggaran HAM, plagiarisme seni, serta pelecehan seksual. Penyebab persatuan dan runtuhnya persatuan disebabkan adanya perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan disintegrasi persatuan bangsa yaitu dampak dari berita palsu dan ancaman yang muncul dari seorang non militer yang dapat mengancam kedaulatan nasional, integritas wilayah, dan keamanan (Luthfi, 2024).

Kegiatan yang terjadi di Indonesia sangat banyak yang keluar dari norma serta sila Pancasila, seperti bertambahnya jumlah kapitalis yang mengutamakan teknologi. Sehingga membuat buruh, petani, serta pekerja kelas bawah semakin terabaikan. Kemudian budaya asli Indonesia tergeser karena datangnya budaya asing ke Indonesia, contoh nya budaya k-pop, serta budaya barat yang telah mempengaruhi tindakan masyarakat terutama cara anak muda dalam berpakaian, berperilaku serta bertindak.

Tantangan Demokrasi Pancasila di Era Globalisasi mencakup berbagai aspek yang kompleks (Rivalina, 2020).

1. Praktik boleh dikorupsi, oligarki, dan polarisasi politik tetap menjadi kendala yang sulit diatasi dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Korupsi meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah serta lembaga negara. Oligarki adalah sistem politik di mana kekuasaan dipegang oleh sejumlah individu atau kelompok elit. Sementara polarisasi politik memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat.
2. Kelemahan lembaga negara dalam menegakkan hukum, di mana penegakan hukum masih saja tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dalam era globalisasi, dimana arus informasi dan interaksi antar negara semakin meningkat, tantangan ini semakin kompleks sehingga membutuhkan tanggapan yang tepat serta cepat dari pemerintah serta lembaga- lembaga negara.
3. Kemampuan menyaring informasi dan memahami sumber informasi yang valid.
4. Persimpangan moral serta persimpangan karakter yang berdampak terhadap generasi muda dengan perilaku individualisme yang tinggi serta nasionalisme yang relatif rendah.
5. Timbulnya gerakan yang militan, memecah belahkan kesatuan menggunakan SARA dari

pihak asing, menyebarkan berita palsu ke semua sosial media serta adanya perilaku hasutan publik.

Dengan demikian, memerlukan upaya bersama untuk mengatasi berbagai tantangan demokrasi Pancasila di era globalisasi tersebut demi mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas diperlukan langkah-langkah konkrit yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika globalisasi. Penguatan lembaga-lembaga anti korupsi, reformasi politik yang inklusif, dan pembangunan budaya politik yang berbasis Pancasila menjadi beberapa strategi yang dapat ditempuh. Selain itu pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik juga penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia di era globalisasi.

KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi khas Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sistem ini menekankan kedaulatan rakyat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persatuan dan keutuhan yang maha esa. Demokrasi Pancasila mengintegrasikan seluruh nilai Pancasila ke dalam kehidupan politik, di mana setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan moral yang mendalam, baik terhadap masyarakat maupun Tuhan. Meski istilah demokrasi Pancasila baru dipopulerkan pada era Orde Baru, prinsip-prinsip dasarnya telah ada dalam UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sejarah demokrasi Pancasila tidak lepas dari berbagai dinamika politik, termasuk masa Demokrasi Terpimpin di era Soekarno dan masa Orde Baru yang represif di era Soeharto. Pada masa orde baru demokrasi Pancasila sering disalahgunakan untuk memperkuat otoritarianisme dengan melibatkan militer dalam pemerintahan, menekan partai politik dan membatasi kebebasan dalam berpendapat. Namun, nilai-nilai Pancasila tetap diakui sebagai panduan moral dalam pemerintahan meski penerapannya seringkali menyimpang.

Di era globalisasi, demokrasi Pancasila menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Globalisasi hampir memengaruhi semua aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk ekonomi budaya, politik dan sosial. Pengaruh globalisasi yang paling nyata adalah arus budaya asing yang dapat mengancam identitas nasional. Globalisasi juga mempercepat perkembangan teknologi yang di satu sisi memudahkan komunikasi dan akses informasi. Namun di sisi lain memunculkan tanaman seperti penyebaran berita palsu, pertimbangan moral serta individualisme yang tinggi terutama pada kalangan generasi muda dalam situasi ini sila-sila Pancasila seperti persatuan, gotong royong serta keadilan sosial menjadi semakin penting demi mempertahankan keutuhan dan stabilitas bangsa.

Selain itu, praktik-praktik seperti korupsi, oligarki dan ketidakadilan hukum tetap menjadi masalah serius yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Oligarki di mana kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan segelintir elite melemahkan kedaulatan rakyat dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam penegakan hukum yang tidak konsisten, di mana hukum lebih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini penting untuk mengembalikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai

landasan moral serta politik pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan globalisasi juga membawa tantangan ideologi sebagai Pancasila meningkatnya individualisme konsumerisme, serta budaya asing terutama di kalangan generasi muda dapat mengikis rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Dalam situasi ini, penting untuk menjaga Pancasila sebagai pilar utama dalam menghadapi perubahan global yang cepat. Pancasila harus tetap menjadi dasar dalam pembangunan karakter bangsa terutama dalam menumbuhkan sikap nasionalisme toleransi dan keadilan sosial di kalangan masyarakat.

Saran

Untuk memperkuat Demokrasi Pancasila di era globalisasi, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, terutama kepada generasi muda, agar mereka memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan berpolitik. Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, teknologi digital harus dimanfaatkan secara positif dengan menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi publik dan menyaring informasi yang valid untuk mengurangi penyebaran berita palsu dan polarisasi politik. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan media untuk menciptakan kampanye nasional yang mendorong rasa kebangsaan, toleransi, dan keadilan sosial, serta menekankan pentingnya menjaga identitas dan kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin deras.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfalah, A., Syakirin, F., Windari, W., Tamala, T., Solihat, S. A., Nurhakim, R. J. F., ... & Noerahman, A. A. (2023). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENJALIN IDENTITAS DAN DEMOKRASI DI ERA GLOBALISASI.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi nilai-nilai pancasila bagi siswa di era globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Held, D. (1995). *Democracy and the global order: From the modern state to cosmopolitan governance*. Stanford University Press.
- Lutfi, A. (2024). Tantangan dan Peluang Demokrasi Pancasila di Era Digital.
- Rivalina, A. F. (2020). DEMOKRASI DALAM SOROTAN PANCASILA DI ERA GLOBALISASI ANTARA IDEALISME DAN REALITAS POLITIK.
- Rohim, M., Rahmawati, L., Raihan, A., & Rizki, S. (2023). Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 662-670.
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1).
- Wardhani, P. A., Ras, A. R., Yusnaldi, Y., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 590-596.